

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara yang tergolong sebagai negara yang sedang berkembang. Dalam upaya untuk memajukan diri, pemerintah secara aktif mendorong pembangunan nasional di berbagai sektor. Namun, kemajuan ini seringkali diikuti oleh ketidakseimbangan antara aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi sering kali mengarah pada eksploitasi sumber daya alam, dan efek dari kerusakan lingkungan semakin dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia. "Pembangunan adalah usaha terencana untuk memanfaatkan lingkungan demi memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan." (Sari et.al, 2012). Salah satu solusi untuk masalah ini adalah penerapan konsep Ekonomi Hijau yang diyakini dapat membawa dunia menuju kehidupan yang lebih sejahtera, adil, makmur, dan berkelanjutan.

Dalam konteks global yang semakin memahami perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, gagasan ekonomi hijau telah muncul sebagai paradigma baru yang menjanjikan. Ekonomi hijau, menurut definisi dari United Nations Environment Programme (UNEP), merupakan suatu sistem ekonomi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia dan mendukung kesetaraan sosial, sambil secara signifikan mengurangi ancaman terhadap lingkungan dan risiko kelangkaan sumber daya alam (UNEP, 2011). Pendekatan ini memberikan solusi komprehensif untuk tantangan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam suatu kerangka kerja yang terkoordinasi.

Indonesia telah menunjukkan dedikasi yang teguh terhadap penerapan ekonomi berkelanjutan. Ini terlihat dalam sejumlah kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dengan jelas memasukkan ekonomi hijau sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional (Bappenas, 2020).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan ambisi yang besar untuk mengekang emisi gas rumah kaca hingga 29% pada tahun 2030, dan bahkan hingga 41% jika mendapatkan dukungan dari luar negeri, yang menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip ekonomi yang berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Konsep indeks ekonomi berkelanjutan muncul akibat perilaku manusia yang lebih fokus pada keuntungan dibandingkan dengan keberlanjutan. Ekonomi saat ini beradaptasi pada kondisi yang serba cepat. Tentu saja, ini memberi dorongan bagi individu untuk menggunakan berbagai cara tanpa perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan, semua itu demi meraih keuntungan maksimal. Dalam banyak aktivitas produksi saat ini, industri seringkali menggunakan sumber daya alam dengan cara yang tidak bijaksana. Hal ini tidak diimbangi dengan upaya pelestarian. Jika kondisi ini terus berlanjut, tentu akan membahayakan kelangsungan lingkungan dan juga manusia (Soehardi, 2022).

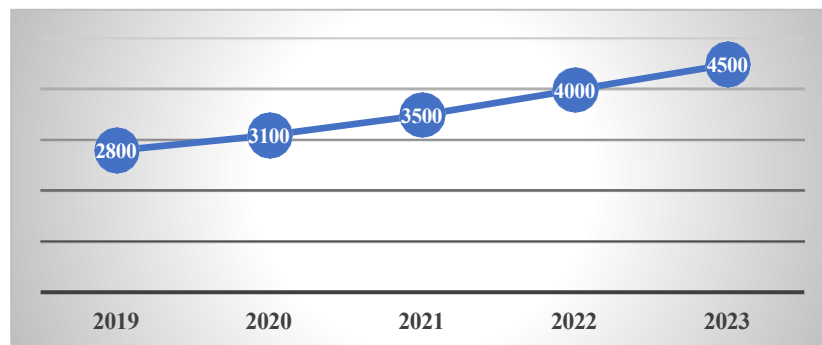
Dalam beberapa tahun terakhir, gagasan ekonomi hijau semakin mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan usaha global untuk menemukan solusi terhadap berbagai masalah internasional yang ada saat ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa keterkaitan antara gagasan ekonomi hijau ini dan konsep lain yang relevan, belum dijelaskan dengan baik. Konsep ekonomi hijau modern adalah ide yang diperkenalkan untuk melengkapi dan memperluas gagasan ekonomi hijau yang sudah ada, dengan fokus pada aspek-aspek yang lebih spesifik mengenai ekonomi yang memenuhi tuntutan lingkungan (*economy to green requirements*) (Andika et al, 2024).

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta memiliki potensi besar untuk menerapkan dan meraih keuntungan dari ekonomi berkelanjutan. Dengan luas hutan yang besar dan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, Jambi memiliki sumber daya alam yang kuat untuk mendukung berbagai program ekonomi hijau. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengungkapkan komitmennya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang menetapkan

pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau sebagai salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah (Pemerintah Provinsi Jambi, 2021).

Di tengah pemandangan provinsi yang melimpah dengan kemungkinan ekonomi berkelanjutan, Kabupaten Kerinci tampil sebagai teladan yang mengesankan dalam penerapan gagasan ini. Terletak di sisi barat Provinsi Jambi, Kerinci terkenal karena keindahan alamnya yang luar biasa, termasuk Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan salah satu area konservasi terluas di Sumatera. Ciri khas geografis dan sumber daya biodiversitas yang kaya di Kerinci menjadikannya sebuah laboratorium alam untuk perwujudan ekonomi hijau yang kreatif dan berkelanjutan.

Potensi ekonomi hijau di Kabupaten Kerinci sangat beragam dan menjanjikan. Sektor pertanian organik, misalnya, telah memperlihatkan adanya pertumbuhan yang signifikan pada beberapa tahun terakhir. Produksi teh organik Kayu Aro, yang telah mendapatkan sertifikasi internasional, menjadi bukti nyata bagaimana praktik pertanian ramah lingkungan dapat menghasilkan produk bernilai tinggi sekaligus melestarikan ekosistem lokal. Berikut ini produksi teh organik kayu aro dalam 5 tahun terakhir dalam satuan ton:



Gambar 1.1 Produksi Teh Organik Kayu Aro

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kerinci, 2023

Kenaikan produksi ini didorong oleh naiknya permintaan pasar, baik domestik ataupun internasional, untuk teh organik berkualitas tinggi yang berasal dari Kayu Aro, Kerinci. Pemerintah daerah dan kelompok tani setempat juga telah menjalankan beragam upaya dalam memaksimalkan produktivitas dan kualitas teh organik melalui program pelatihan, penyediaan bibit unggul, dan bantuan sarana

produksi. Selain itu, pengembangan ekowisata di sekitar Danau Kerinci dan Gunung Kerinci telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal sambil mendorong konservasi lingkungan.

Kontribusi ekonomi hijau terhadap pembangunan Kerinci tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi hijau telah membantu dalam pelestarian kearifan lokal masyarakat Kerinci, khususnya pada hal pengelolaan sumber daya alam. Sistem "Lubuk Larangan", misalnya, yang merupakan praktik tradisional dalam pengelolaan sumber daya perikanan, telah berhasil diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan perikanan modern, menciptakan sinergi antara pengetahuan tradisional dan praktik konservasi kontemporer (Zakaria et al., 2022).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kerinci (2020) menyatakan bahwa pada tahun 2019, pemerintah setempat mendirikan pusat budidaya ikan tawar di beberapa lokasi, seperti Danau Kerinci dan Sungai Penuh. Pemerintah menyediakan bantuan berupa bibit ikan, pakan, serta pelatihan untuk kelompok pembudidaya ikan. Ini telah berhasil meningkatkan hasil produksi ikan tawar di Kabupaten Kerinci dari 2.500 ton di tahun 2018 menjadi 3.200 ton pada tahun 2022. Penyebab pertumbuhan ini adalah karena sejak tahun 2018, Dinas Perikanan secara teratur melaksanakan pelatihan kepada para nelayan mengenai teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga memberikan pendampingan dalam pembentukan kelompok nelayan serta akses ke pembiayaan.

Sedangkan pada tahun 2020, pemerintah daerah membangun dermaga pendaratan ikan di Sungai Penuh untuk memfasilitasi nelayan lokal. Fasilitas ini dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan, cold storage, dan akses jalan yang memadai. Dan pada tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Kerinci bekerjasama dengan TNI AL untuk melakukan patroli rutin di wilayah perairan pesisir. Hal ini membantu mencegah pencurian ikan dan menjaga ekosistem pesisir yang penting bagi keberlangsungan perikanan tangkap. Jadi secara umum, upaya-upaya tersebut telah membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Kerinci dalam 5 tahun terakhir. Namun demikian, masih terdapat ruang

untuk pengembangan lebih lanjut, seperti peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Kesempatan untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan di Kerinci sangat besar. Sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik mikrohidro yang berlokasi di wilayah sungai yang kaya, masih belum dimaksimalkan secara penuh. Perkembangan sektor pengolahan hasil hutan non-kayu, seperti madu hutan dan berbagai rempah, juga membuka peluang cerah untuk menambah nilai bagi produk lokal, sembari tetap menjaga keberlanjutan hutan (Bappeda Kabupaten Kerinci, 2022).

Namun, penerapan ekonomi berkelanjutan di Kerinci tidak terhindar dari berbagai rintangan. Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di lokasi-lokasi terpencil, masih menjadi penghalang bagi kemajuan dan penyebaran produk yang ramah lingkungan. Selain itu, kurangnya pemahaman dan keterampilan di kalangan masyarakat dalam menerapkan praktik ekonomi berkelanjutan perlu diatasi dengan program pendidikan dan pelatihan yang tepat. Mengingat potensi signifikan dan tantangan yang ada, penelitian mendalam mengenai pelaksanaan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Kerinci menjadi sangat relevan dan krusial.

Penjelasan di atas sejalan dengan penelitian dari Karimi, *at.al.*, (2021) yang berjudul "Analisis Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Kerinci berada pada kategori sedang, dengan nilai indeks sebesar 0,56. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks tersebut antara lain penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan pelestarian hutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Kerinci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut pemaparan tersebut, penulis berminat dalam menjalankan sebuah penelitian melalui judul **“INDEKS EKONOMI HIJAU DI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI”**.

Penjelasan di atas sejalan dengan penelitian dari Karimi, *at.al.*, (2021) yang berjudul "Analisis Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Kerinci berada pada kategori sedang, dengan nilai indeks sebesar 0,56. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks tersebut antara lain penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan pelestarian hutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Kerinci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut pemaparan tersebut, penulis berminat dalam menjalankan sebuah penelitian melalui judul **“INDEKS EKONOMI HIJAU DI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan indeks ekonomi hijau di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?
2. Berapa besar indeks ekonomi hijau dari indikator-indikator terpilih di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemanfaatan indeks ekonomi hijau di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
2. Mengetahui indeks ekonomi hijau dari indikator-indikator terpilih di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sejumlah pihak yang memerlukannya, baik dalam aspek teoritis maupun penerapan praktis, termasuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti: studi ini memberikan peluang kepada penulis untuk memperdalam pemahaman serta memperoleh pengalaman baru mengenai Indeks Ekonomi Hijau di daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2. Untuk Perguruan Tinggi: hasil dari studi ini diharapkan menjadi sumber informasi tambahan dan acuan yang berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Lembaga/Institusi: penelitian ini diharapkan bisa berfungsi sebagai referensi dalam mengevaluasi kondisi Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2. Bagi Pemerintah: penelitian ini harapannya dapat berfungsi menjadi acuan pada pengambilan keputusan kebijakan yang berhubungan dengan Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.